



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK (DKIS) KOTA CIREBON

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Ridha dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Inforamsi dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2017 ini sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKIS selama periode tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang merupakan rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengacu kepada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Penyusunan LKIP DKIS Kota Cirebon Tahun 2017 ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun demikian kami menyadari bahwa dalam penyusunan tersebut masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, untuk itu sangat diharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon khususnya dan bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah pada umumnya.

Cirebon, Februari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

DAN STATISTIK KOTA CIREBON



ING DAIMAN, S.Ip, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680822 199703 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Tahun 2017 merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2017 sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi DKIS Kota Cirebon adalah “***Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang PATUH Menuju Kota Cirebon Yang Ramah Tahun 2018***”. Untuk mencapai Visi DKIS Kota Cirebon, ditetapkan Misi yang harus dilakukan, yaitu :

Meningkatkan Kapasitas Layanan Informasi dan Komunikasi dalam Upaya Pemberdayaan Potensi Masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja DKIS Kota Cirebon, diperoleh tingkat capaian kinerja sasaran strategi I “Terwujudnya hubungan pemerintah dengan masyarakat yang harmonis” sebesar 100 % dengan didukung oleh 7 program, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis II “Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi” sebesar 240 % didukung dengan 7 program. Penjabaran visi misi DKIS tersebut merupakan rincian capaian kinerja sasaran pada Misi kedua Walikota dan Wakil Walikota pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Pencapaian sasaran kinerja DKIS Kota Cirebon Tahun 2017 dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon Nomor: 050.2/KEP. -DISHUBINKOM/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2017-2018. Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2017 terdiri dari 14 program dengan 52 kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon memperoleh anggaran sebesar Rp15.747.738.275,00 digunakan untuk

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKIS Kota Cirebon serta untuk mencapai target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Realisasi anggaran sebesar Rp15.124.359.142,00 atau sekitar 96,04% dari total anggaran yang diterima.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.2. Aspek Strategis DKIS	8
1.3. Isu Strategis DKIS	10
1.4. Rencana Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
1.1. Rencana Kinerja Tahunan	16
1.2. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja DKIS	22
3.2. Capaian Kinerja Atas IKU DKIS	24
3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	23
3.4. Realisasi Anggaran DKIS	27
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk Satuan Kerja Instansi Pemerintah Daerah (SKPD). SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh SKPD termasuk DKIS diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. Untuk periode tahunan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang wajib disusun setiap akhir tahun termasuk oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS).

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan tugas urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi informatika dan Statistik kota Cirebon mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon mempunyai 3 (tiga) urusan yang ditangani, yaitu :

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Urusan Bidang Statistik; dan
3. Urusan Bidang Persandian.

Berikut adalah rincian kewenangan dari urusan yang ditangani oleh
DKIS kota Cirebon :

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah.
2.	Aplikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah; b. Pengelolaan e-government dilingkup daerah.

2. Urusan Bidang Statistik

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah.

3. Urusan Bidang Persandian

No	Sub Urusan	Rincian Urusan
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah b. Penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar-perangkat daerah

b. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan SOTK yang tercantum dalam Perwali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon, adalah sebagai berikut :

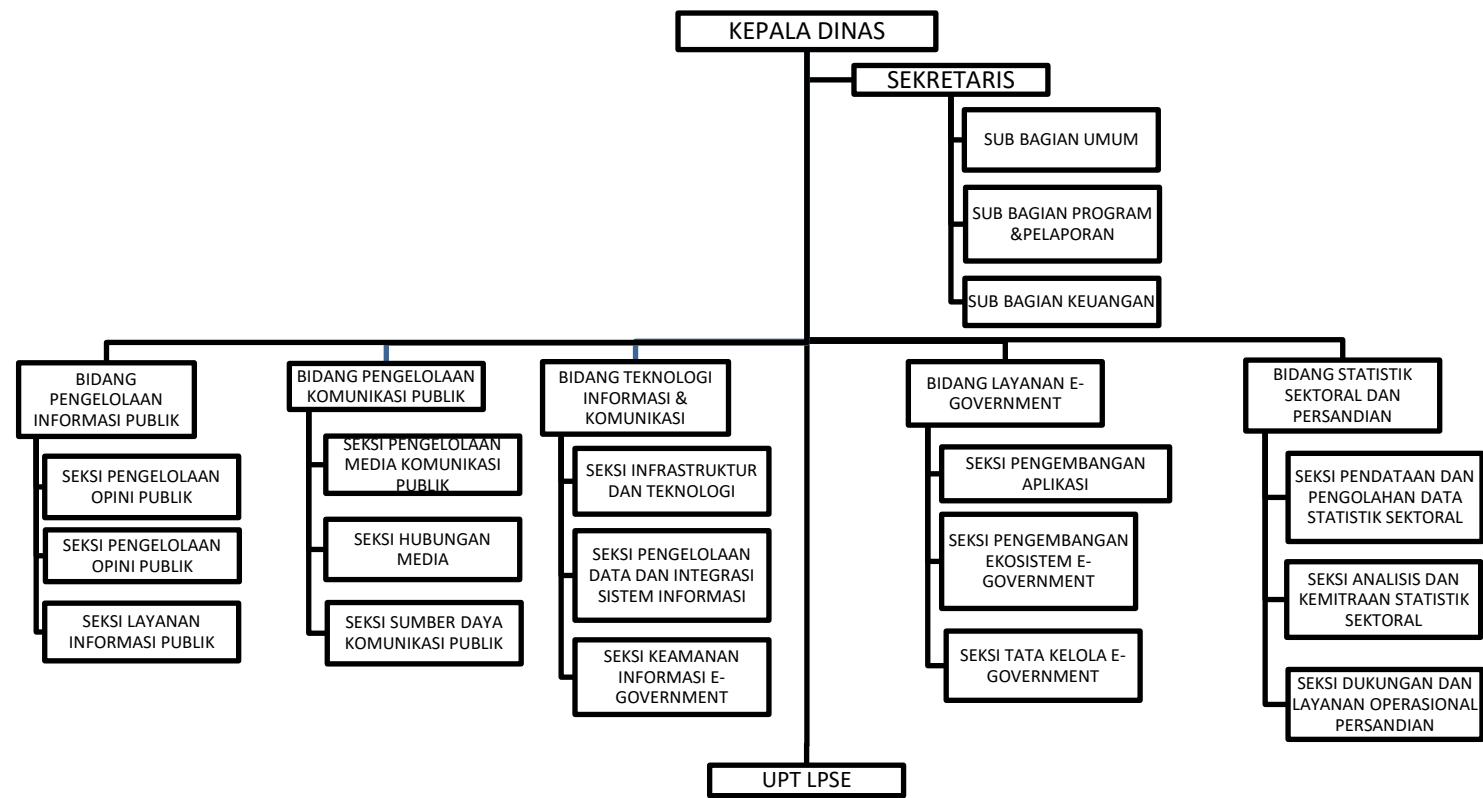
Susunan Organisasi DKIS Kota Cirebon terdiri atas :

Kepala Dinas, membawahkan:

1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahkan:
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Layanan Informasi Publik.
3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Hubungan Media; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - c. Seksi Keamanan Informasi E-Government.

5. Bidang Layanan E-Government, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government; dan
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government.
6. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
 - a. Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Statistik Sektor;
 - b. Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektor; dan
 - c. Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - a. UPTD Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE),
membawahkan :
 - Sub Bagian Tata Usaha.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 59 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : STRUKTUR ORNANISASI DINAS
KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK
KOTA CIREBON



1.2. Aspek Strategis DKIS

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai Lembaga Teknis Daerah memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan tugas urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kondisi penyelenggaraan pelayanan DKIS Kota Cirebon dapat ditinjau dari beberapa aspek :

1. Kelembagaan

Kelembagaan DKIS Kota Cirebon sebagaimana diatur pada Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu oleh Sekretaris dan Lima Kepala Bidang yaitu Bidang Layanan E-Government; Bidang Pengelolaan Informasi Publik; Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; Bidang Statistik Sektor dan Persandian; dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta ditambah UPTD Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

2. Hasil Kinerja

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon telah melaksanakan kegiatan utama Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik daerah antara lain :

- a. Tersusunnya master plan Smart City Kota Cirebon;
- b. Terpeliharanya peningkatan infrastruktur teknologi informasi berupa pemeliharaan jaringan wireless, tower, server dan bandwidth internet koneksi seluruh Perangkat Daerah di Kota Cirebon;
- c. Telah terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan para jurnalis di kota Cirebon melalui kegiatan penguatan hubungan dengan media;
- d. Telah tersedianya data data pembangunan daerah seperti penyusunan Buku PDRB; IPM; Profil Daerah dan Indikator Makro Daerah.

3. Sumber Daya Manusia

DKIS Kota Cirebon dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Wali Kota melaksanakan tugas urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, didukung oleh SDM yang cukup berkompeten. Jumlah SDM yang dimiliki oleh DKIS Kota Cirebon pada tahun 2017 sebanyak 49 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 orang, Golongan III sebanyak 33 orang dan Golongan II sebanyak 6 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, SDM DKIS Kota Cirebon terdiri dari Pasca Sarjana (S2) sebanyak 14 orang, Sarjana (S1) sebanyak 26 orang, D III sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 8 orang.

4. Dukungan Anggaran

DKIS Kota Cirebon, di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kota Cirebon sebesar Rp15.403.469.944,00 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung. Anggaran tersebut cukup memadai untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon yang telah ditargetkan.

5. Dukungan Teknologi Informasi

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, mempunyai pengaruh positif bagi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Saat ini Pemerintah Kota Cirebon sudah memiliki Internet Service Provider (ISP) sendiri dan seluruh SKPD sudah terkoneksi internet.

1.3. Isu Strategis DKIS

Aspek-aspek yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang sangat cepat

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dinamika perubahannya sangat cepat, sehingga daerah harus bisa cepat pula menyesuaikan dengan kebijakan yang baru ditetapkan. Kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi setiap daerah.

- b. Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu peningkatan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan penguasaan teknis penyelenggaraan komunikasi, informatika dan statistik.
- c. Masih ada beberapa SOP (Standard Operating Procedure) yang belum dibuat oleh unit kerja dan pelaksanaannya masih belum optimal.
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan E-Government dan integrasi sistem.
- e. Penggunaan beberapa aplikasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
- f. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sudah terbentuk tetapi perlu peningkatan peranannya secara lebih maksimal.

1.4. Rencana Strategis

a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Adapun Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah **“TERWUJUDNYA PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK YANG *PATUH* MENUJU KOTA CIREBON YANG RAMAH TAHUN 2018”**

Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang ***PATUH*** merupakan kepanjangan dari Profesional. Akuntabel, Transparan,

Utama dan Handal di bidang Komunikasi, bidang Informatika dan bidang Statistik serta pelayanan administrasi.

✓ **Profesional** diindikasikan oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional untuk mendukung Pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik kepada masyarakat;

✓ **Akuntabel** diindikasikan oleh terselenggaranya tata kelola pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang efisien berdaya saing dan aman;

✓ **Transparan** diindikasikan oleh terselenggaranya pelayanan atau informasi kepada masyarakat yang transparan, bersih dan efektif;

✓ **Utama** diindikasikan oleh terciptanya budaya pelayanan yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien;

✓ **Handal** diindikasikan oleh terselenggaranya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa diperoleh dengan cepat, tepat dan handal.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, disusunlah misi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon sebagai berikut
“Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan komunikasi dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat.”

Tabel. 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra DKIS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun	
				2017	2018
1.	Membangun suasana pemerintah yang harmonis, mengayomi dan komunikatif	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 95 %	90 %	95%
2.	Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100 %	95% (2 Peraturan)	100%
			Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur dari jumlah 15 sistem ke 17 sistem tahun 2018	16 Sistem	17 Sistem
			Terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dgn masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan 100%	2 Kerjasama	3 Kerjasama

b. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon telah menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- Menyediakan pedoman dan tolok ukur kinerja pada DKIS
- Menyediakan dukungan kebutuhan rutin kantor yg memadai
- Meningkatkan ketersediaan dan dukungan data dan informasi
- Meningkatkan pelayanan dan pemeliharaan jaringan Teknologi dan Informasi

2. Program

Program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Daya/ Informasi/ Statistik Daerah
6. Program Persandian Komunikasi dan Informasi
7. Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi
8. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

9. Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
10. Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi
11. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi
12. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa;
13. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2017 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen yang memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka memudahkan penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka disusunlah rencana kinerja tahunan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Adapaun rencana kinerja tahun 2017 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 95%	90 %
Terwujudnya Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100 %	95% (2 Peraturan)
	Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur dari jumlah 15 sistem ke 17 sistem tahun 2018	16 Sistem
	Terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dgn masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan 100 %	2 Kerjasama

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra DKIS dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memperhatikan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkan hal tersebut dituangkan

melalui rencana program dan kegiatan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Adapun uraian perjanjian kinerja DKIS Tahun 2017 tersebut sebagai berikut:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja DKIS Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 95 %	90 %	1.Pengembangan komunikasi, informasi dan Media Masa	974.456.000
			2.Kerjasama bidang Komunikasi dan Informasi	103.995.000
			3.Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	291.024.000
			4.Kerjasama informasi dgn media massa	2.139.374.000
			5.Persandian komunikasi dan informasi	100.000.000
			6.Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	248.410.000
			7.Pengembangan informasi dan komunikasi publik	226.950.000
Terwujudnya Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100 %	95% (2 Peraturan)	1.Penataan Peraturan Perundang-undangan	0
	Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai penunjang pelaksanaan kinerja	16 Sistem	1.Peningkatan infrastruktur teknologi informasi	2.438.192.000
			2.Pengembangan dan pengelolaan	319.917.075

	aparatur dari 15 sistem kle 17 sistem tahun 2018		sistem informasi	
			3.Pengembangan data/ informasi/ Statsitsik daerah	312.354.000
	Terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dgn masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan 100 %	2 Kerja sama	1. Pelayanan administrasi perkantoran	1.198.434.700
			2.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.030.762.000
			3.Peningkatan disiplin aparatur	47.945.000
			4.Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	218.184.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DKIS Tahun 2017 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja DKIS selama tahun 2017 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban organisasi. Isi dari akuntabilitas kinerja tersebut merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan penjabarannya, penjelasan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja DKIS.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator sasaran. Pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon tahun 2017, yaitu :

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2017 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah.
2. Indikator Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator (jumlah kegiatan); jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.
3. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan/atau relatif (%).

Cara pengukuran/penghitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Cara Pengukuran Kinerja DKIS Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN
1.	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 95 % (90 %)	Dengan menghitung jumlah yang masuk pada sistem LAPOR dengan jumlah yang distribusikan ke OPD terkait
2.	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100 % (2 Peraturan)	Dengan menghitung jumlah peraturan yang ditetapkan
		Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai penunjang	Dengan menghitung jumlah aplikasi (sistem) yang tersedia

	informasi	pelaksanaan kinerja aparatur dari jumlah 15 sistem ke 17 sistem tahun 2018 (16 sistem)	
		Terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dgn masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan 100% (2 Kerjasama)	Dengan menghitung jumlah Kerjasama antara pemerintah kota dengan masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan

Karakteristik indikator kinerja DKIS bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian yang semakin baik dengan rumusan :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja > 85% sampai dengan 100% = Sangat berhasil
- Capain kinerja > 75% sampai dengan 85% = Berhasil
- Capain kinerja > 55% sampai dengan 75% = Cukup berhasil
- Capaian kinerja kurang dari 55% = Kurang berhasil

3.1. Capaian Kinerja DKIS

Pencapaian sasaran strategis DKIS pada tahun 2017, sesuai dengan dokumen renstra DKIS tahun 2017-2018 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sebanyak dua sasaran telah ditetapkan pada tahun 2017 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja DKIS Tahun 2017 yang memiliki

2 indikator sasaran yang terdiri dari 4 indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis DKIS Kota Cirebon Tahun 2017, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 95 %	90 %	100 %	100 %	Sangat berhasil
2.	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100 %	95 % (2 Peraturan)	4 Peraturan	200 %	Sangat Berhasil
		Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur dari jumlah 15 sistem ke 17 sistem tahun 2018	16 Sistem	18 sistem	120 %	Sangat Berhasil
		Terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dgn masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan	2 Kerja sama	10 Kerja sama	500 %	Sangat Berhasil

		100%				
--	--	------	--	--	--	--

Berdasarkan uraian pada tabel 5 di atas, hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
1	Terwujudnya hubungan pemerintah dengan masyarakat yang harmonis	1 indikator	100 %	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemeeintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	3 indikator	273,3 %	Sangat Berhasil

3.2. Capaian Kinerja atas IKU DKIS

Tabel 6
Capaian Kinerja atas IKU DKIS Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT
Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo	90%	100%	100%	Sangat Berhasil
Tersedianya dan terintegrasinya sistem informasi manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	90%	100%	100 %	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian IKU DKIS dari 4 indikator yang ditetapkan telah menunjukkan capaian yang memuaskan.

3.3. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berkaitan dengan misi “Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan komunikasi dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat” adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : “Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 7
Capaian Indikator Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2017	Tercapai / Tidak	Realisasi s/d 2017	Target Akhir Renstra
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah	-	-	-	100 %	90 %	Tercapai	100 %	100 %

Capaian terwujudnya hubungan pemerintah dengan masyarakat yang harmonis dengan satu indikator sudah mencapai target yang ditetapkan. Indikator indeks kepuasan terhadap kinerja pemerintah sudah mencapai 100 % dari target yang ditetapkan pada akhir Restra.

Sasaran 2 : “Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya sistem manajemen dan proses dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terdiri dari 3 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 273,3 % dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Capaian Indikator Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2017	Tercapai / Tidak	Realisasi s/d 2017	Target Akhir Renstra
Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government	-	-	-	2 peraturan	4 peraturan	Tercapai	200 %	100 %
Terpenuhinya instrastruktur TIK sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur	-	-	-	18 Sistem	16 Sistem	Tercapai	120 %	17 Sistem
Terjalin kerja sama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dengan masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan	-	-	-	10 Kerja sama	2 Kerja sama	Tercapai	500 %	100 %

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan 3 (tiga) indikator kinerja tahun 2017 memperlihatkan capaian realisasi yang sudah mencapai target yang ditetapkan. Indikator tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-goverment, realisasi tahun 2017 telah menunjukkan angka 200 %. Dan telah mencapai target kinerja masa akhir renstra. Untuk capaian indikator terpenuhinya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur dihasilkan tahun 2017 menunjukan angka 120 % dari 3 sistem yang terbangun dari 15 sistem menjadi 18 sistem. Selanjutnya untuk capaian terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dengan masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan telah menunjukan angka 500 % dimana target 2 kerjasama naik menjadi 10 kerja sama pada tahun 2017, ini menunjukan target kinerja akhir Renstra telah tercapai.

3.4. Realisasi Anggaran DKIS

APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 dan Penjabarannya melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 71 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan dengan Perubahan APBD Kota Cirebon melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dan penjabarannya melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017. Adapun APBD Kota Cirebon Tahun 2017 untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon dianggarkan sebagai berikut:

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI
BALANJA TIDAK LANGSUNG		5.097.740.000	4.885.275.464
BELANJA LANGSUNG		10.649.998.275	10.239.083.678
Urusan Rutin Yang ada Di Setiap SKPD :			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.198.434.700	1.208.716.386
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.030.762.000	562.979.902
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47.945.000	15.782.500
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2181.184.500	126.245.000
Urusan Komunikasi Informatika:			
Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
1.	Pelayanan Informasi Publik	248.410.000	245.072.000
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik			
1.	Penguatan dengan Media	226.950.000	224.862.500
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
1.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	117.660.000	116.585.000
2.	Pengadaan Bahan Bacaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	209.505.000	208.490.000
3.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	247.291.000	233.770.000
4.	Pengelolaan Pelayanan Komisi Informasi Kota Cirebon	400.000.000	380.951.400
Program Kerjasama Bidang Komunikasi dan Informasi			
1.	Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Institusi Pendidikan, Swasta dan Masyarakat	53.955.000	45.456.000
2.	Penyelenggaraan Layanan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	50.000.000	48.851.000
Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi			
1.	Bimbingan Teknis Informasi, Komunikasi dan Telematika	291.024.000	288.360.000
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		114.000.000	112.440.000
1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	1.993.170.000	1.987.693.500
2.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan		

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI
	Pemerintahan Daerah	32.204.000	31.408.000
	3. Sosialisasi/Penyuluhan Internet Sehat dan Aman (Insan)		
	Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	159.870.000	157.750.000
	1. Pemeliharaan Wireless	100.000.000	99.546.000
	2. Pemeliharaan Tower	50.000.000	49.710.000
	3. Pemeliharaan Server		
	4. Pengadaan Sewa Bandwith Internet Koneksi dan Peralatan Pendukung	811.470.000	794.425.675
	5. Relokasi dan Rekonfigurasi Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kota Cirebon	102.617.000	99.626.500
	6. Pengadaan Perangkat Keras/Hardware dan jaringan Teknologi Informasi	1.214.235.000	1.122.648.605
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi		
	1. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi	50.000.000	48.945.000
	2. Pemeliharaan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen	50.000.000	49.275.000
	3. Penyediaan Layanan Integrasi Sistem Informasi E-Government	50.000.000	49.655.000
	4. Penyediaan layanan Sarana dan Prasarana Pengendalian Smart Ciy	169.917.075	167.321.000
Urusan Statistik:			
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		
	1. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	48.476.000	48.476.000
	2. Penyusunan IPM	49.846.000	49.846.000
	3. Penyusunan Profil Daerah	102.981.000	102.981.000
	4. Penyusunan Indikator Makro Daerah	49.801.000	49.801.000
	5. Analisis Data Statistik	61.250.000	60.125.000
Urusan Persandian:			
1	Program Persandian Komunikasi dan Informasi		
	1. Pengadaan peralatan Persandian	100.000.000	100.000.000

Berdasarkan jumlah anggaran yang sebesar Rp15.747.738.275,-, anggaran yang terkait langsung dengan kegiatan adalah sebesar Rp10.649.998.275,00 dengan realisasi sebesar Rp10.239.083.678,00 (96,14%). Dari total anggaran tersebut,

anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran pertama “terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis” sebesar Rp4.084.209.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.023.144.400,00 atau sebesar 98,50 % yang tersebar pada 7 program di bawah ini :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Program pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	248.410.000,00	245.072.000,00
2.	Program pengembangan informasi dan komunikasi publik	226.950.000,00	224.862.500,00
3.	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	974.456.000,00	939.796.400,00
4.	Program kerjasama bidang komunikasi dan informasi	103.995.000,00	94.307.000,00
5.	Program peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi	291.024.000,00	288.360.000,00
6.	Program kerjasama informasi dengan media massa	2.139.374.000,00	2.131.541.500,00
7.	Program Persandian komunikasi dan informasi	100.000.000,00	99.205.000,00
	Jumlah	4.084.209.000,00	4.023.144.400,00

Sedangkan yang mendukung pencapaian sasaran kedua “Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi” sebesar Rp6.566.789.275,00 dengan realisasi sebesar Rp6.215.939.000,00 atau 94,66 % yang tersebar pada 7 program di bawah ini :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.198.434.700,00	1.048.735.921,00
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.030.762.000,00	1.975.067.427,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	47.945.000,00	45.565.000,00
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	218.184.500,00	196.439.150,00
5.	Program infrastruktur teknologi informasi	2.438.192.000,00	2.323.706.780,00
6.	Program pengembangan dan pengelolaan sistem informasi	319.917.075,00	315.196.000,00
7.	Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	312.354.000,00	311.229.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	Jumlah	6.566.789.275,00	6.215.939.278,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Tahun 2017 telah disusun dalam rangka pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2017. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 %;
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government sebanyak 4 (empat) peraturan atau 200 % dari target;
3. Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur dengan hasil capaian kinerja sebanyak 3 (tiga) sistem dari 15 sistem menjadi 18 sistem yang sudah terbangun atau 120 % dari target;
4. Terjalinnnya kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dengan masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan dengan hasil capaian sebanyak 10 (sepuluh) kerjasama dari target yang ditentukan sebanyak 2 (dua) kerjasama atau 500 %.

Berdasarkan dari 4 (empat) indikator tersebut, diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran “Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis” sebesar 100% dan rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran “Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi”

sebesar 273%. Sasaran pencapaian misi DKIS sekaligus merupakan rincian capaian kinerja sasaran pada Misi kedua Walikota dan Wakil Walikota Cirebon pada RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018, yaitu “Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN”

Sedangkan dari sisi anggaran, untuk mencapai sasaran “Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis” dengan satu indikator dianggarkan sebesar Rp4.084.209.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.023.144.400,00 atau sebesar 98,50 % dan untuk sasaran “Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi” dengan 3 (tiga) indikator dianggarkan sebesar Rp6.566.789.275,00 dengan realisasi sebesar Rp6.215.939.000,00 atau 94,66 %. Total anggaran belanja langsung yang dapat direalisasikan DKIS Kota Cirebon tahun 2017 sebesar 94.14%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DKIS Tahun 2017 telah kami susun sebagai wujud pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKIS di Tahun 2017.

Cirebon, Februari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA CIREBON



IING DAIMAN, S.Ip, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680822 199703 1 003

LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2017**

SKPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Tahun Anggaran : 2017

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKSI
1.	Terwujudnya hubungan pemerintah dan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah 95 %	90 %	100 %	100 %	Sangat berhasil
2.	Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang e-government 100 %	95 % (2 Peraturan)	2 Peraturan	200 %	Sangat Berhasil
		Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur dari jumlah 15 sistem ke 17 sistem tahun 2018	16 Sistem	18 sistem	120 %	Sangat Berhasil
		Terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dgn	2 Kerja sama	10 Kerja sama	500 %	Sangat Berhasil

		masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan 100%				
--	--	--	--	--	--	--

KERTAS

PENGUKURAN KINERJA

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah;

No	Tanggal Masuk Laporan	Judul Laporan	Disposisi to	Tanggal Disposisi
1	12 August 2017 12:43:06	wabah wereng melanda sawah di daerah kota cirebon	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Cirebon	16 August 2017 12:35:41
2	15 August 2017 17:43:45	aspirasi transportasi online di kota cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	16 August 2017 16:29:38
3	15 August 2017 21:12:37	aspirasi terkait transportasi online di kota cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	16 August 2017 12:26:33
4	15 August 2017 21:18:02	keberadaan ojek online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	16 August 2017 12:29:49
5	15 August 2017 21:26:09	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	16 August 2017 16:35:36
6	15 August 2017 21:35:51	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	18 August 2017 11:53:23
7	15 August 2017 21:36:08	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	18 August 2017 11:51:06
8	15 August 2017 22:43:05	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	18 August 2017 12:02:35
9	16 August 2017 03:38:18	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	18 August 2017 12:12:45
10	16 August 2017 03:48:38	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	18 August 2017 14:31:08
11	16 August 2017 08:18:02	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	18 August 2017 11:59:54
12	16 August 2017 09:37:52	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	16 August 2017 16:27:24
13	16 August 2017 11:24:16	fasilitas lampu taman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon	16 August 2017 12:13:03
14	16 August 2017 19:58:55	informasi laporan keuangan di website	Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	24 August 2017 15:23:55
15	17 August 2017 14:32:08	aspirasi transportasi online	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	18 August 2017 14:34:05
16	18 August 2017 09:42:05	keberadaan pengamen	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon	18 August 2017 12:20:51
17	06 September 2017 00:00:00	lampu pengatur lalu lintas mati	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	06 September 2017 16:08:43
18	12 September 2017 11:51:54	Permintaan Infirmary Dokter Jaga RSUD Gunung Jati	Dinas Kesehatan Kota Cirebon	12 September 2017 11:57:50

No	Tanggal Masuk Laporan	Judul Laporan	Disposisi to	Tanggal Disposisi
19	13 September 2017 11:43:03	tempat pembuangan sampah yang mengganggu kenyamanan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	29 September 2017 08:06:53
20	13 September 2017 11:43:27	Informasi permintaan penerimaan CPNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon	13 September 2017 11:54:55
21	28 September 2017 18:21:18	lampu PJU sering konslet	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	06 October 2017 08:58:07
22	05 October 2017 08:58:09	usul mengurangi kemacetan lalu lintas di perlintasan kereta api	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	10 October 2017 08:28:49
23	10 October 2017 09:49:38	kesediaan blangko ktp	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon	24 November 2017 15:08:34
24	19 October 2017 00:00:00	KPE (kartu Pegawai Elektronik)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon	14 November 2017 06:10:19
25	08 November 2017 08:11:29	informasi kartu keluarga sejahtera	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon	24 November 2017 15:06:40
26	13 November 2017 04:33:11	transportasi umum	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	14 November 2017 00:26:57
27	23 November 2017 01:45:49	ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon	24 November 2017 15:01:47
28	15 December 2017 11:30:03	Pelayanan Administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon	15 December 2017 13:52:16

Masyarakat yang melaporkan melalui Sistem LAPOR sebanyak 28 laporan dan telah didistribusikan seluruhnya kepada OPD terkait

2. Tersedianya peraturan perundang undangan tentang e-government, yaitu :

1. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555.05/Kep.262-DKIS/2017 tentang Pembentukan Dewan Cirebon Kota Cerdas (Smart City);
2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555.05/Kep.263-DKIS/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Cirebon Kota Cerdas (Smart City);
3. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555.4/Kep.123-DKIS/2017 tentang Pejabat Nama Domain Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
4. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

3. Terpenuhinya infrastruktur TIK sebagai pelaksanaan kinerja aparatur, yaitu;

1. Sistem Barang Milik Daerah Kota Cirebon
2. Sistem E-Badan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
3. Sistem Pembayaran Pajak Daerah
4. Sistem Portal Kepegawaian
5. Sistem Administrasi Kelurahan Terpadu
6. Sistem Pelayanan Digital Administrasi Umum Kelurahan
7. Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Sistem Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
9. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap
10. Sistem Geografi Pajak Daerah
11. Sistem Kehadiran
12. Sistem Administrasi Umum Kelurahan
13. Sistem Siduga Satpol Pp Kota Cirebon
14. Sistem Kepegawaian
15. Sistem Perencanaan Daerah Kota Cirebon
16. Sistem Pendapatan Daerah
17. Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
18. Sistem Mail Cirebon Kota

4. Terjalin kerjasama pemanfaatan TIK antara pemerintah kota dengan masyarakat dan lembaga pendidikan, yaitu :

1. Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Cirebon, Nomor : 23/KOMINFO/HK.03.02/05/2017, Nomor 120.23/KB.8-Adm.pem.um/2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Cirebon
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA, tentang Kerjasama Implementasi Gerakan Menuju Cirebon Smart City
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. INDOSAT,Tbk, tentang Kerjasama Implementasi Gerakan Menuju Cirebon Smart City Nomor :555.4/KB.21-Adm.Pem.Um/2017, Nomor 599/HOK-HOKC/LGL/17
4. Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang Pendampingan Pengembangan Aplikasi Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Cirebon Tahun 2018, Nomor : 434/PR.07-NK/3274/KPU-Kot/X/2017, Nomor 555.4/KB.25-Adm.Pem.Um/2017
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Sekolah Tinggi manajemen Informatika dan Komputer Catur Insan Cendekia (STMIK CIC) tentang Penyelenggaraan Tridama Perguruan Tinggi Nomor : 420/KB.23-Adm.Pem.Um/2017, Nomor : 454/MoU/IX2017
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Sekolah Tinggi manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) IKMI Cirebon , Nomor : 420/KB.24-Adm.Pem.Um/2017, Nomor : 005/SPK/STMIK-IKMI/X/2017, tentang Penyelenggaraan Tridama Perguruan Tinggi
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tentang Kerjasama Implementasi Gerakan Menuju Cirebon Smart City Nomor :555.4/KB.20-Adm.Pem.Um/2017, Nomor K.Tel 32/HK810/R3W-3B100000/2017
8. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi Informatika Kota Bandung Dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Nomor 119/1201-Diskominfo ; Nomor 120,23/PKS.15-DKIS/2017 tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Cirebon;

9. Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Swakelola Antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Nomor 973/516/Bapenda.V/2017; Nomor 970/PKS.19-DKIS/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
10. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Nomor 470/KB.10-Adm.Pem.Um/2017 ; Nomor B099/BPS/32741/07/2017 tentang Pengumpulan, Pengolahan , Analisis, Penyusunan dan Perumusan Data Statistik Kota Cirebon.